



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI (MENKUMHAM)  
DAN PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (PPUU DPD)  
DALAM RANGKA EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2023**

**TANGGAL 22 AGUSTUS 2023**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 22 Agustus 2022
W a k t u	: Pukul 15.09 WIB s/d 16.17 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 1. Anggota: Hadir 31 Orang dan Ijin 12 Orang dari 9 Fraksi dari 80 Orang Anggota.
	: 2. Undangan: - Menteri Hukum dan HAM RI (KUMHAM beserta jajaran); - Ketua PPUU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI (KUMHAM) dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU DPD) dalam rangka Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dipimpin dan dibuka oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.09 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan

mempersilakan Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan PPUU DPD untuk menyampaikan pandangan atas Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

## II. KESIMPULAN.

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyetujui untuk menyepakati:

1. menambahkan 4 (empat) RUU ke dalam Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023, yaitu: RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; RUU tentang Penilai; RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional; dan RUU tentang Permuseuman;
2. menarik 9 (sembilan) RUU dari Prolegnas RUU Perubahan Keempat RUU Tahun 2020-2024, yaitu: RUU tentang Wabah; RUU tentang Praktik Kedokteran; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; RUU tentang Penjaminan Polis; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; dan RUU tentang Pelaporan Keuangan; dan
3. menambahkan 3 (tiga) RUU ke dalam Prolegnas RUU Perubahan Keempat RUU Tahun 2020-2024, yaitu RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional, dan RUU tentang Permuseuman.

## III. PENUTUP

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 ditutup pukul 16.17 WIB.

Jakarta, 22 Agustus 2022  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT BADAN  
LEGISLASI  
WIDIHARTO, S.H., M.H